

## SEJARAH PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DAN PERGESERAN NAFKAH SUKU DAYAK DI KALIMANTAN BARAT

Jajat Sudrajat

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura

---

### ABSTRACT

This study is intended to analyze the history of forest resources utilization and its implication toward socio-economic problems and livelihood orientation of Dayak tribe in West Kalimantan. This research was done by environmental history approach, while data were analyzed by qualitative method. The results of study show that there are three periods in utilization of forest resources, before independence until Old Order, New Order, and Reformation Order. New Order intervention has depleted primary forest in rapid period, while Reformation Order has built oil palm plantation as consequence the open space of forest land which is very vulnerable toward land burning problem. Now, Dayak tribes live in three types of ecosystem, forest conservation area, wetland paddy field location, and plantation zone. Still done rotating cultivation in forest conservation area caused conflict to the government policy, while livelihood change to be paddy farmer has positive impact. Conversely, livelihood change to be oil palm farmer has implication to social and economic disparities.

Keywords: utilization of forest resources, livelihoods transformation, Dayak tribe

### ABSTRAK

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis sejarah pemanfaatan sumber daya hutan dan implikasinya terhadap masalah-masalah sosial ekonomi dan orientasi nafkah suku Dayak di Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan pendekatan sejarah lingkungan, sedangkan data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat tiga tonggak penting dalam pemanfaatan sumber daya hutan, yaitu era sebelum kemerdekaan hingga Orde Lama, Orde Baru, dan era Otonomi Daerah (Reformasi). Intervensi Orde Baru telah menghabiskan hutan primer dalam waktu yang singkat, sedangkan era Otonomi Daerah telah melahirkan pembukaan perkebunan kelapa sawit sebagai konsekuensi dari lahan hutan yang terbuka dan rawan kebakaran. Kini suku Dayak berada di tiga ekosistem, yaitu area sekitar dan dalam kawasan hutan konservasi, daerah pertanian padi sawah, dan sekitar perusahaan perkebunan. Masih berlangsungnya perladangan rotasi dalam kawasan hutan konservasi telah mengakibatkan konflik dengan pemerintah, sedangkan perubahan nafkah menjadi petani padi sawah melahirkan dampak positif. Sebaliknya, pergeseran nafkah menjadi pekebun kelapa sawit mengarah kepada menguatnya kesenjangan ekonomi dan sosial.

Kata kunci: pemanfaatan sumber daya hutan, pergeseran nafkah, suku Dayak

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam adalah aspek paling strategis dalam pembangunan bangsa, sebab kekayaan alam merupakan satu dari beberapa sumber daya pembangunan yang penting. Namun dalam prakteknya, banyak dipengaruhi berbagai kepentingan diantara komponen-komponen bangsa, sehingga sering berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal seperti ini dapat dikaji dari kasus pemanfaatan sumber daya hutan di Kalimantan Barat yang telah menimbulkan kerusakan dahsyat dan telah meminggirkan komunitas yang hidup di dalamnya. Sebagaimana kasus ini dinyatakan oleh Hardin (1968: 1243 - 1248) dalam artikel "*The Tragedy of the Commons*", hutan sebagai sumber daya yang sulit ditegaskan hak-hak kepemilikannya atau sebagai barang milik bersama (*commons goods*), cenderung menjurus kepada kepunahan oleh sebab tindakan pengambilan yang berlebihan. Dalam kasus sumber daya alam seperti itu, tidak ada insentif bagi setiap orang untuk melestarikannya.

Dilihat dari sejarahnya, di Kalimantan Barat terdapat beberapa tonggak dalam pemanfaatan sumber daya hutan, mulai dari periode sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi dan Otonomi Daerah saat ini. Pada setiap tonggak yang dilaluinya, suku Dayak harus melakukan adaptasi, yang tidak jarang mendapatkan himpitan dan tekanan penghidupan (naskah). Komunitas suku Dayak sebagai pengembara hutan melalui budaya perladangan rotasi atau secara ekologis sangat bergantung pada sumber daya hutan, terpaksa harus melakukan berbagai penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan dahsyat sumber daya alam yang menjadi lingkungan pengaruhnya. Secara perlahan tapi pasti, komunitas suku Dayak terus mengalami pergeseran, baik dalam hal struktur okupasi maupun orientasi ekonominya. Menurut Dharmawan (2007: 181) perubahan strategi naskah umumnya terjadi sangat dinamis mengikuti adanya perubahan sosial dan ekologi. Pada saat ini,

suku Dayak sudah banyak yang mengadopsi usahatani padi sawah yang merupakan usahatani pada lahan basah yang bersifat menetap, menanam karet unggul, dan berbagai jenis usahatani lainnya, bahkan saat ini banyak yang berada dalam lingkungan usaha perkebunan yang menerapkan manajemen moderen.

Pada sisi lain, di beberapa bagian lapisan masyarakat Dayak yang belum berkembang, tampak orientasi ekonomi masih bersifat pra kapitalis. Mereka tidak banyak mengalami perubahan, baik dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, maupun budayanya. Pada masyarakat yang demikian, ditandai oleh orientasi kehidupan sosial yang jauh melebihi kehidupan ekonominya. Sebaliknya, pada masyarakat Dayak yang telah mengalami transformasi pertanian dan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi sektor moderen, diyakini telah mengalami perubahan orientasi ekonomi dan strategi naskah yang cukup nyata. Gerak perubahan masyarakat seperti ini penting untuk diteliti sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pembangunan perdesaan dan pembangunan sosial secara keseluruhan. Sebab setiap kegagalan dalam proses adaptasi naskah akan meminggirkan mereka yang masih lemah ke jurang kehidupan yang kurang menguntungkan. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat memberi jajaran pemahaman atas proses perubahan tersebut yang selama ini sedikit sekali mendapat perhatian para peneliti.

Makna strategi naskah memiliki pengertian yang luas dan mendalam daripada aktivitas mata pencaharian semata. Pengertian strategi naskah yang dimaksud tersebut menurut Dharmawan (2007: 185) tidak lain mencakup taktik dan aksi yang dilakukan individu ataupun kelompok dalam rangka mempertahankan kehidupan dengan tetap menjaga eksistensi infrastruktur sosial, struktur sosial dan sistem nilai budaya yang berlaku. Kerangka analisis seperti ini dinilai cocok diterapkan dalam mengkaji proses perubahan sosial komunitas suku Dayak di Kalimantan Barat yang secara historis sangat dekat

dengan pemanfaatan sumber daya hutan. Adapun konsep perubahan sosial mengacu kepada Soekanto (2007: 261), diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku.

Penulis berusaha menganalisis tonggak-tonggak pemanfaatan sumber daya hutan dalam beberapa periodisasi di atas, serta mendeskripsikan kondisi terkini terkait nafkah suku Dayak setelah provinsi ini mengalami beberapa periode pemanfaatan sumber daya hutan. Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian kajian tentang perubahan sosial dan pergeseran nafkah suku Dayak di Kalimantan Barat, dengan tujuan penelitian sebagai berikut: (1) menganalisis sejarah pemanfaatan sumber daya hutan di Kalimantan Barat, dan (2) menganalisis pengaruh perubahan sumber nafkah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi dan orientasi nafkah suku Dayak pada masa kini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan utama sejarah lingkungan, yaitu untuk menganalisis interaksi antara manusia dan lingkungan secara dinamis. Pada sisi lain, dilakukan pula studi kasus untuk menjelaskan terjadinya pergeseran nafkah akibat adanya perubahan lingkungan serta menganalisis pengaruh perubahan sumber nafkah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi dan orientasi nafkah suku Dayak pada masa kini.

Tonggak-tonggak sejarah dikumpulkan berdasarkan hasil analisis penulis dari beberapa dokumen ilmiah yang ada. Adapun dalam studi kasus, data primer dikumpulkan dari hasil wawancara terstruktur dan semi terstruktur terhadap para petani dan tokoh masyarakat Dayak yang terdapat di dua desa yang dijadikan tempat studi kasus. Dua desa tersebut adalah Desa Kayu Tanam (sebuah desa pertanian padi sawah) dan Desa Manggang (sebuah desa sekitar perkebunan kelapa

sawit) yang keduanya terdapat di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Pemilihan lokasi kecamatan dan desa ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan dapat menjelaskan fenomena yang diungkap dalam kajian ini.

Data sekunder dikumpulkan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu, dipelajari pula Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dokumen ilmiah lainnya, baik yang terdapat di tingkat nasional maupun lokal. Pada tingkat lokal dipelajari buku dan majalah yang diterbitkan oleh Institut Dayakologi (ID), sebuah lembaga yang aktif memperjuangkan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat. Pada penelitian ini, analisis dan pembahasan masalah dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan agar bisa menjelaskan fenomena perubahan sosial atau pergeseran nafkah pada saat ini secara apa adanya (Idrus, 2009: 22).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Suku Dayak di Kalimantan Barat**

Berdasarkan sejarahnya menurut Hasanuddin (2014: 29), suku Dayak berasal dari Tiongkok Selatan yang sekarang bernama Yunan. Para imigran dari Tiongkok tersebut datang secara bergelombang membentuk kelompok-kelompok kecil melewati jazirah Malaysia terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke nusantara. Kelompok yang pertama kali datang adalah Negrid dan Weddid yang sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Selanjutnya disusul oleh kelompok yang lebih besar yaitu Deutro-Melayu dan Proto-Melayu. Pada awalnya, kelompok Deutro Melayu menempati daerah pesisir pantai dan tepian sungai Kapuas, sedangkan Proto-Melayu tinggal di daerah pedalaman, namun setelah kedatangan orang Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaysia akhirnya orang Dayak terdesak ke daerah-

daerah perhuluan sungai atau wilayah pedalaman Kalimantan (Coomans, 1987: 3-4).

Setelah mengalami perkembangan dalam sejarah migrasinya, selanjutnya suku Dayak di Kalimantan dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu Dusun dan Murut yang merupakan kelompok utara, Dayak Ngaju disebut sebagai kelompok selatan, dan Dayak Kenyah, Kayan, Kayang serta Ibani sebagai kelompok tengah (Dove, 1988: 2). Di Kalimantan Barat, dari tiga kelompok suku Dayak tersebut, terbagi-bagi lagi kepada sekitar 151 sub etnis Dayak dengan 168 bahasa (Alloy dkk., 2008: 24). Walaupun terbagi ke dalam ratusan sub suku, namun mereka tetap memiliki beberapa kemiripan sebagai identitas budaya suku Dayak yang khas, yaitu adanya rumah betang panjang, pola nafkah utama berupa perladangan rotasi, pandangannya terhadap alam, serta memiliki budaya material yang khas seperti tembikar, mandau, sumpit, dan seni tari Dayak. Pada dasarnya, suku Dayak sebagai suku asli di Kalimantan Barat tidak banyak berbeda dengan corak kehidupan suku-suku lain di nusantara seperti di Sumatera, Sulawesi, dan Papua, mereka tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berladang yang merepresentasikan adat istiadat dan kepercayaannya. Suku Dayak juga tidak dapat dipisahkan dari sumber daya hutan yang merupakan sumber penghidupannya, sehingga orang Dayak dapat dianggap sebagai suku pengembara hutan.

Pada masa kini, berdasarkan sensus penduduk Tahun 2003 jumlah suku Dayak mencapai 33,75% dari jumlah penduduk Kalimantan Barat sebanyak 3.732.950 jiwa, sedangkan suku Melayu 33,75%, Tionghoa 10,01%, dan sisanya adalah suku-suku lainnya (Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Banjar, Batak, dan lain-lain). Seiring dengan waktu dan perkembangan pembangunan nasional, kini suku Daya tidak hanya bermukim dengan menempati rumah betang panjang, namun sudah banyak yang mendiami rumah keluarga tunggal. Pola permukimannya juga sudah menyebar tidak hanya mendia-

mi kawasan hutan atau pinggir kawasan hutan, namun sudah banyak yang bermukim di kawasan pertanian padi sawah, pinggir perkebunan kelapa sawit, dan tinggal di perkotaan (ibu kota kecamatan, kabupaten, maupun provinsi).

### **Periode Sebelum Kemerdekaan sampai Orde Lama**

Penghidupan atau nafkah suku Dayak pada masa lalu bertumpu pada pemanfaatan sumber daya hutan yang sangat kaya. Untuk menggambarkan kekayaan alam di Kalimantan Barat, dapat ditelusuri dari tulisan Nieuwenhuis (1994: 89) yang mendeskripsikan kekayaan sungai dan danau di Kalimantan Barat ketika hutan masih utuh, sebagai berikut.

Orang-orang Kayan Mendalam, sama seperti suku-suku lain di Kupuas Hulu, dilimpahi dengan kekayaan ikan di daerah yang mereka diaminya. Di samping nasi sebagai makanan pokok, ikan merupakan salah satu makanan utama mereka. Bukan hanya Kapuas dan cabang-cabangnya yang melimpah dengan ikan, pada kedua sisi sungai-sungai yang mengalir di dataran Kapuas pun ditemukan danau-danau yang memanjang yang semuanya penuh dengan ikan.....”

Pada waktu itu, sumber nafkah orang Dayak yang dianggap penting meliputi hasil ladang (padi, umbi-umbian, sayuran), berburu dan menangkap ikan, berkebun karet, serta beternak babi dan ayam. Semua sumber nafkah ini hanya ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja (subsisten). Menurut Dove (1988: 8), diantara keempat sumber penghidupan tersebut yang paling penting adalah perladangan padi, sebab berladang bagi orang Dayak bukan hanya kegiatan ekonomi sebagai sumber nafkah semata, tetapi merupakan kehidupan keagamaan, menjadi penentu struktur sosial, pola permukiman, dan berlangsungnya hukum adat.

Sebelum kemerdekaan hingga Orde Lama, sumber daya alam di Kalimantan Barat dapat dikatakan masih utuh. Ham-

Tabel 1. Luas Tutupan Hutan di Kalimantan Tahun 1950

Jenis Tutupan	Luas (hektar)	Persen
Hutan hujan primer, hutan lindung, hutan rawa dan hutan rimba, perkebunan	47.500.000	86,52
Hutan pantai	700.000	1,28
Hutan sekunder	3.200.000	5,83
Luas total hutan	51.400.000	93,62
Savana, padang rumput dan sawah tanpa irigasi	3.500.000	6,38
Luas total lahan	54.900.000	100,00

pir seluruh wilayah provinsi dengan luas sekitar 14.753.000 hektar ditutupi oleh hutan, kecuali sungai, lahan pertanian, dan permukiman. Keadaan ini dapat dilihat dari data tutupan wilayah di Pulau Kalimantan yang sebagian besar masih berupa hutan, sedangkan savana, padang rumput, dan sawah tanpa irigasi hanya seluas 3,5 juta hektar sebagaimana disajikan pada Tabel 1 (FWI/GFW, 2001: 9).

### **Suku Dayak Menghadapi Intervensi Orde Baru**

Kebijakan pemerintahan Orde Baru merupakan tonggak sejarah penting dalam pemanfaatan sumber daya hutan di Kalimantan Barat. Pada masa itu dilahirkan berbagai kebijakan terkait pemanfaatan lahan dan hutan, yaitu mencakup pembukaan lahan untuk pertanian pangan dan perkebunan, dilaksanakannya program transmigrasi, dan pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemberian ijin HPH merupakan tonggak penting bagi orang Dayak, karena melalui ijin inilah yang dianggap paling banyak menghabiskan sumber daya hutan berupa kayu alam. Sejak tahun 1968 hingga akhir tahun 1990 berdasarkan catatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, setidaknya telah berdiri 75 perusahaan pemegang konsesi HPH dengan luas ijin keseluruhan mencapai 46,60% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Alqadrie, 1994: 249).

Beroperasinya perusahaan-

perusahaan besar yang bergerak dalam penebangan kayu di Kalimantan Barat membawa dampak buruk bagi komunitas suku Dayak. Penebangan kayu dalam jumlah yang sangat besar telah menekan suku Dayak dalam memperoleh berbagai sumber pangan yang berasal dari hutan seperti madu, jamur, tanaman buah, sayuran, tanaman obat, hewan buruan, dan beberapa bentuk sumber pangan alami lainnya. Pada waktu itu, berbagai penolakan dari suku Dayak juga ada, namun pemerintah Orde Baru tidak menanggapi dengan serius dan menganggap berbagai penolakan tersebut sebagai hal yang biasa. Beroperasinya perusahaan-perusahaan kayu ini mendasarkan pada Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan dan kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan penanaman modal atau investasi.

Kebijakan pemerintah pada era tersebut, ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Namun kemudian, kebijakan tersebut bermuara pada peminggiran suku Dayak yang sangat dekat dengan hutan sebagai sumber penghidupannya. Pada era Orde Baru, cara eksploitasi sumber daya alam hutan dan peminggiran masyarakat seperti itu, sesungguhnya tidak hanya dialami Suku Dayak namun juga oleh suku-suku lainnya, seperti pula dialami Suku Bajo, sebuah suku pengembara laut di Teluk Tomini (Obie dkk., 2015:78-80). Hal ini

bertolak dari ketidakjelasan kepemilikan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Beberapa fakta tersebut telah memberi bukti mengenai masifnya krisis lingkungan hidup di Indonesia setelah era kemerdekaan dibandingkan dengan masa kolonial (Nawiyanto, 2015: 56).

Pada sisi lain, untuk sektor perkebunan kelapa sawit hanya beroperasi satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Perkebunan Nusantara VII dengan luas konsesi mencapai 135.176 hektar. Perusahaan ini memiliki kebun terluas di Kabupaten Landak, Sanggau, dan Ketapang (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 1998: 168). Perkebunan kelapa sawit pada era ini dikembangkan dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau PIR yang terintegrasi dengan program transmigrasi sehingga sering disebut dengan istilah PIR-Trans Kepala Sawit. Pengembangan perkebunan kelapa sawit ini banyak mendapat penolakan dari masyarakat Dayak yang merasa kurang memberikan manfaat.

Mirip dengan pengembangan kelapa sawit, perkebunan karet dalam bentuk perusahaan juga dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Perkebunan Nusantara XIII, dengan perkembangan luasan hingga akhir Orde Baru mencapai 12.736 hektar (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 1998: 168). Perkebunan karet pun dikembangkan melalui pola PIR dan PIR-Trans. Namun demikian, pengembangan perkebunan karet dengan pola PIR ini tidak berjalan dengan baik, dan hingga kini masih menyisakan banyak persoalan terkait dengan ketidakpatuhan petani plasma untuk mengembalikan kredit dan persoalan-persoalan lainnya yang sangat rumit. Oleh karena menghadapi masalah yang begitu kompleks, maka hutang dari pengembangan perkebunan karet dengan pola PIR ini masih menjadi persoalan yang tidak terselesaikan.

### **Kebijakan Era Reformasi (Otonomi Daerah)**

Memasuki era reformasi (otonomi daerah) cadangan hutan primer yang berada di luar kawasan lindung hampir seluruhnya

telah ditebang, yang tersisa hanya hutan sekunder dan semak belukar yang potensial menjadi lahan kritis. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan tekanan yang sangat serius terhadap penghidupan suku Dayak, karena sumber-sumber pangan alami yang berasal dari hutan terus mengalami penipisan. Seiring dengan itu, perladangan rotasi juga terus mendapat tekanan karena siklusnya yang semakin pendek, sehingga hasil perladangan tiap satuan luas juga semakin merosot. Pada banyak lokasi, cadangan pangan berupa padi hasil perladangan umumnya tidak cukup lagi untuk menyediakan pangan keluarga selama satu tahun. Dalam kondisi seperti ini, orang Dayak terpaksa harus membeli beras dari pasar yang tidak pernah dialami pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, pendapatan yang berasal dari menoreh karet menjadi sangat penting sebagai penopang ketahanan pangan rumah tangga.

Merespon kondisi yang ada, kebijakan pada era reformasi diarahkan kepada upaya menyelamatkan lahan-lahan yang telah terbuka, baik berupa hutan sekunder, semak belukar, maupun lahan kritis. Penyelamatan lahan tersebut sangat diperlukan, karena ternyata lahan yang telah terbuka ini sangat rawan terhadap kebakaran yang sangat sulit dicegah. Pada bagian lain, masyarakat di pedalaman juga banyak yang kehilangan pekerjaan setelah HPH meninggalkan wilayahnya. Dalam kondisi demikian, pembukaan perkebunan kelapa sawit merupakan solusi yang layak dilakukan, bahkan dianggap sebagai penyelamat untuk mengatasi keterpurukan ekonomi baik pada tingkat lokal maupun nasional. Sebab, dalam jangka waktu yang relatif singkat (kurang lebih 4 tahun) tanaman kelapa sawit telah berbuah sehingga dapat menciptakan penghasilan bagi masyarakat di pedalaman. Sejak saat itu, luas perkebunan kelapa sawit pun meningkat dengan pesat, setidaknya hingga akhir tahun 2014 tercatat 177 perusahaan (BPS, 2014: 249-284). Gambaran selengkapnya menyangkut perkembangan luas tanam kelapa sawit, karet, padi sawah, dan luas

Tabel 2. Perkembangan Luas Tanaman Utama dan Kawasan Hutan: Orde Baru sampai Era Reformasi (Otonomi Daerah)

Jenis Tanaman	Luas Tanam dalam Tahun (hektar)					
	1990	1994	1998	2004	2009	2014
Kelapa Sawit (Perusahaan)*	22.635	66.424	135.176	184.553	750.946	1.312.517
Karet (Perusahaan)**	7.502	14.141	12.736	8.952	4.235	3.590
Karet Rakyat**	380.573	414.986	451.058	459.303	567.086	588.387
Padi Sawah**	185.333	209.125	248.362	260.167	331.992	360.926
Penutupan Hutan***	5.170.039	4.961.936*	4.934.303 <sup>*)</sup>	4.893.530 <sup>*)</sup>	4.758.421	4.434.805

Keterangan:

\* BPS Provinsi Kalbar Tahun 1991, 1995, 1999, dan 2005 dan Disbun Kalbar Tahun 2010 dan 2015

\*\* BPS Provinsi Kalbar Tahun 1991, 1995, 1999, 2005, 2010, dan 2015

\*\*\* P BKH Wilayah III Pontianak – Data penutupan hutan kering primer dan sekunder; <sup>\*)</sup>Data Tahun 1996; <sup>\*)</sup>Data Tahun 2000; <sup>\*)</sup>Data Tahun 2003

penutupan hutan dapat diperhatikan pada Tabel 2.

Terdapat perdebatan dalam pembukaan lahan untuk kelapa sawit ini, terutama dari sisi para pecinta lingkungan yang sangat menghawatirkan merosotnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di Kalimantan. Namun, kondisi ini pun tidak dapat dicegah karena banyak kelompok masyarakat di pedalaman yang telah merasakan manfaat dari kehadiran beberapa perkebunan kelapa sawit yang telah menyediakan sumber penghidupan baru, termasuk komunitas suku Dayak. Pada beberapa perkebunan kelapa sawit yang cukup berhasil, terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana kenyataan ini dilaporkan oleh Budidarsono et al. (2012: 1-4).

Dilihat dari pemanfaatan lahan-lahan yang ada, saat ini komunitas suku Dayak telah berada pada tiga himpitan ekosistem yang mendampinginya (Tabel 2), yaitu: (a) kawasan hutan konservasi (hutan lindung) yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah setelah era kemerdekaan, (b) daerah pertanian menetap berupa padi sawah pada lokasi dataran rendah di sekitar perbukitan, dan (c) wilayah sekitar perusahaan perkebunan kelapa

sawit atau karet. Pada kawasan hutan lindung, orang Dayak masih hidup pada ekosistem hutan yang menjadi budayanya, namun sudah dibatasi oleh aturan-aturan perlindungan hutan menurut versi pemerintah. Sementara itu, di dua ekosistem lainnya komunitas suku Dayak telah mengalami perubahan drastis dalam sistem nafkah yang sangat berbeda dari masa sebelumnya. Mereka telah mengalami pergeseran nafkah baik dalam hal orientasi maupun dalam strategi yang dilakukannya. Untuk memahami hal itu, pada bagian akhir tulisan ini dipaparkan bagaimana implikasi pergeseran nafkah itu terjadi yang membawa pada perubahan sosial komunitas suku Dayak di Kalimantan Barat.

#### **Problematika Nafkah di Kawasan Hutan**

Ketika lahan di Kalimantan Barat sudah hampir habis terbagi-bagi kepada banyak perusahaan pemegang ijin dari pemerintah, ternyata masih banyak suku Dayak bermukim di kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Mereka sudah mendiami beberapa kawasan hutan tersebut jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada umumnya, penetapan kawasan konservasi hanya didasarkan pada pertim-

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Desa di Sekitar dan Dalam Kawasan Hutan Konservasi

<b>Letak terhadap Kawasan Hutan Konservasi</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Luas Desa (hektar)</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>
Dalam Kawasan Hutan	119	2.138.080	184.874
Pinggir Kawasan Hutan	524	5.261.763	1.052.386
Jumlah	643	7.399.843	1.137.260

Sumber: BPKH Wilayah III Pontianak, 2011

bangun kondisi geografis, keunikan ekosistem, dan fungsi-fungsi lingkungan hidup lainnya menurut kaidah kelestarian alam versi pemerintah, tidak mempertimbangkan apakah ada penduduk yang telah bermukim di dalamnya atau tidak. Berdasarkan data yang ada di Balai Peman-tapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak (Tabel 3), jumlah penduduk yang bermukim di sekitar dan dalam kawasan hutan di Kalimantan Barat masih cukup besar, yakni mencapai lebih dari satu juta jiwa (BPKH Wilayah III Pontianak, 2011: 116).

Pola nafkah komunitas suku Dayak yang bermukim di sekitar atau dalam kawasan hutan konservasi relatif tidak banyak mengalami perubahan, karena mereka masih sangat bergantung pada kekayaan sumber daya hutan (jasa lingkungan hidup) di sekitar permukimannya. Mereka masih tetap melakukan perladangan rotasi yang menjadi budayanya. Oleh karena itu, penetapan kawasan hutan konservasi tidak jarang pula yang masih menimbulkan konflik dengan masyarakat di sekitarnya. Kondisi seperti ini menjadi dilema bagi pemerintah, dan oleh karena itu pula berbagai pihak menyadari perlunya perumusan model pengelolaan kawasan hutan konservasi yang cocok dengan realitas ini. Satu konsep yang harus ditekankan dalam pengelolaan, adalah perlunya memberi insentif yang dapat mendorong partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam upaya konservasi (Hollenbach, 2005: 85-86) atau memberi akses lebih luas kepada masyarakat sekitar hutan dalam mencapai tujuan nafkah dan manajemen lingkungan hidupnya (Langton et al., 2005: 43).

Hingga saat ini, konflik antara orang Dayak yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan pengelola hutan konservasi masih sering terjadi, misalnya dalam perselisihan yang terjadi akhir-akhir ini antara pihak Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (TNBB-BR) dan warga Desa Belaban Ella, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi (Kalimantan Review, 2013: 49). TNBB-BR adalah sebuah area konservasi yang terdapat di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Konflik yang terjadi dalam kasus ini terkait dengan klaim lahan sebagai tempat perladangan komunitas suku Dayak. Pada beberapa lokasi di dalam TNBB-BR dianggap sebagai lahan milik adat yang sudah dimiliki oleh kakek nenek suku Dayak sebelum taman nasional ini ada. Lahan yang diklaim tersebut meliputi lahan bekas ladang, bekas kebun karet, bekas sawah, dan bekas permukiman tua. Sebab secara adat, pemilikan lahan bagi orang Dayak ditentukan berdasarkan mereka yang pertama kali membuka hutan atau menggarap lahan dalam aktivitas perladangan rotasi.

Adanya konflik seperti ini, telah mengakibatkan semakin menyusutnya luas kawasan hutan yang dilindungi pemerintah, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Hingga akhir tahun 2014 berdasarkan data dari BPKH wilayah III Pontianak, penutupan hutan primer dan sekunder di kawasan hutan konservasi terus berkurang, yaitu hanya tersisa sekitar 4,43 juta hektar. Sampai saat ini, pada tataran konsep, kalangan masyarakat adat mengklaim bahwa mereka lebih paham bagaimana mengelola hutan, semen-

tara dari sisi pemerintah ada kekhawatiran jika kawasan ini berada di luar kontrol pemerintah akan menimbulkan guncangan ekologi yang dapat menimbulkan bencana. Konflik atas tanah dan sumber daya alam hutan sebagaimana digambarkan dalam kasus tersebut, banyak mencuat secara konsisten setelah era reformasi (otonomi daerah) disebabkan ketidakjelasan kepemilikan antara tanah negara dan tanah rakyat, sehingga secara potensial akan terus mengancam keberadaan hutan-hutan konservasi di Indonesia (Abd. Kadir W. dkk., 2013: 189-190; Dunggio dan Gunawan, 2009: 50-51; Verbist dan Pasya, 2004: 25).

### **Pergeseran Nafkah Menjadi Petani Padi Sawah**

Semenjak Orde Baru menggulirkan program revolusi hijau, pergeseran nafkah dari budaya perladangan ke pertanian padi sawah terus berlangsung. Pada beberapa lokasi yang memiliki potensi, secara bertahap terus dilakukan pencetakan lahan sawah dengan bantuan pemerintah. Pergeseran nafkah yang terjadi pada umumnya didorong pula oleh realitas telah hilangnya areal untuk perladangan rotasi. Untuk menggambarkan proses pergeseran nafkah yang terjadi serta berbagai implikasinya, pada studi ini mengambil kasus di Desa Kayu Tanam, sebuah desa yang jaraknya sekitar 80 km dari Kota Pontianak. Tepatnya berada pada wilayah Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Desa penelitian termasuk dalam kategori dataran rendah, namun memiliki topografi wilayah yang agak bergelombang yang dicirikan oleh adanya beberapa perbukitan kecil. Pada topografi datar antar perbukitan itulah petakan-petakan sawah didirikan, sehingga membentuk daerah persawahan rawa lebak.

Dilihat dari tata guna tanahnya, lokasi penelitian termasuk desa pertanian padi sawah, karena sebagian besar lahan diperuntukkan usahatani padi sawah. Wilayah desa dengan luas mencapai 20 km<sup>2</sup>, terdiri dari lahan sawah seluas 574 hektar, lahan perkebunan karet rakyat 349 hektar, dan sisanya adalah lahan

pekarangan, jalan, sungai, kuburan, dan fasilitas umum lainnya (BPS Kabupaten Landak, 2014: 32-36). Di atas keadaan geografi dan potensi sumber daya alam tersebut, telah bermukim penduduk sebanyak 2.103 jiwa atau sekitar 499 kepala keluarga (BPS Kabupaten Landak, 2014: 11-13). Adapun permukiman penduduknya sebagian besar menyebar di tepi jalan raya yang menghubungkan Kota Pontianak dengan Kabupaten Landak dan sebagian kecil berada di lingkungan perkampungan yang berada di dalam desa. Pada lingkungan permukiman tersebut sudah tidak ada lagi rumah betang panjang sebagai ciri khas suku Dayak pada periode sebelumnya. Kondisi perumahan penduduk di desa ini sudah cukup baik, sebagian besar dikategorikan sebagai rumah permanen dengan menggunakan dinding tembok, bahkan banyak yang sudah menggunakan lantai keramik dan atap metal.

Pada saat ini, berdasarkan pada penggunaan lahan-lahan yang ada, sumber nafkah utama di desa Kayu Tanam terdiri dari usahatani padi sawah dan perkebunan karet. Hasil panen padi sawah umumnya ditujukan untuk memenuhi kecukupan pangan rumah tangga, sedangkan hasil penjualan getah karet dimaksudkan untuk mendapatkan uang tunai. Usahatani padi sawah umumnya sudah dilakukan dua kali tanam dalam setahun, sehingga hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan pada rumah tangga yang berlahan luas hasilnya sudah ditujukan untuk dijual. Usahatani padi sawah sudah dilakukan dengan olah tanah dan sudah ada upaya pemupukan (Urea, SP-36, Phonska, dll.) meskipun belum optimal. Adapun benih padi yang digunakan sebagian besar masih menggunakan benih lokal yang berumur panjang dan sebagian kecil sudah ada yang menggunakan benih unggul seperti "Ciherang" yang berumur pendek (Tabel 4). Namun, produktivitas usahatannya masih perlu ditingkatkan, karena produktivitas rata-rata baru mencapai 3-4 ton per hektar, padahal potensinya bisa mencapai 6-8 ton per hektar.

Tabel 4. Dimensi Penting Beberapa Aktivitas Usahatani di Desa Kayu Tanam

Jenis Kegiatan	Besar Kegiatan	Indikator Penting yang Ditemukan
Usahatani lahan kering	Dilakukan oleh sebagian kecil rumah tangga dalam skala terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan untuk membudidayakan jenis tanaman palawija, seperti sayuran, ketela pohon, cabe rawit, dll.</li> <li>Sudah dilakukan pemupukan dan olah tanah</li> </ul>
Usahatani padi sawah	Dilakukan oleh sebagian besar rumah tangga dengan luas pengusahaan 0,25 – 1 hektar. Produktivitas usahatani telah mencapai 3 – 4 ton/hektar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usahatani sudah dilakukan dengan olah tanah menggunakan traktor</li> <li>Sebagian besar menggunakan benih padi lokal yang berumur panjang</li> <li>Sudah dilakukan pemupukan tanaman menggunakan urea, SP-36, phonska, dan lainnya meskipun belum optimal</li> <li>Umumnya menerapkan pola pertukaran tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan penanaman dan panen</li> </ul>
Usahatani kebun karet	Sudah ada yang menanam karet unggul dengan jarak tanam teratur, namun sebagian besar masih mengusahakan karet lokal dengan jarak tanam kurang teratur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada usahatani karet unggul sudah ada upaya pemupukan meskipun belum optimal</li> </ul>

Sumber: data primer penelitian

Dilihat dari orientasinya, sebagian besar penduduk telah mengalami pergeseran yang nyata, yaitu sumber nafkah tidak hanya ditujukan sebagai “ekonomi penyambung hidup” semata sebagaimana diistilahkan oleh Dove (1988: 7), melainkan sudah mengarah pada pandangan ekonomi yang lebih rasional. Namun demikian, mereka masih tetap menjaga solidaritas dan prinsip moral ekonomi untuk menjaga kerukunan sosial dalam sistem kelembagaan sosial desa. Perkembangan yang cukup positif, mereka sudah banyak yang memanfaatkan lembaga keuangan lokal seperti *credit union* (sebuah koperasi kredit) sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang, yaitu Credit Union Pancur Kasih dengan kantor cabangnya yang cukup megah ada di desa ini. Sementara itu, sumber nafkah rumah tangga lainnya yang bersifat asli, namun masih tetap ada adalah memelihara ternak babi dan ayam sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi dan pendukung keperluan rumah tangga lainnya, karena ternak sewaktu-waktu dapat dijual.

Pada komunitas suku Dayak di desa ini ditengarai sedang terjadi persebaran

teknologi usahatani yang ditandai mulai diadopsinya teknologi pemupukan dan penggunaan benih unggul. Hal ini, dapat menjadi indikator bahwa masyarakat sedang mengalami pergeseran nafkah yang mengarah pada jenis lapangan kerja yang beragam. Masuknya teknologi dalam sistem produksi akan membawa perubahan pada masyarakat dan akan menggeser struktur pekerjaan, tidak hanya mengandalkan pada usahatani semata melainkan pula pada pekerjaan di luar usahatani. Hal ini sebagai akibat semakin besarnya kegiatan produksi dan pendapatan petani yang akan mendorong pada peningkatan konsumsi.

Secara meluas perubahan-perubahan tersebut telah membuat struktur dan kelembagaan sosial ikut bergeser dan mengalami transisi menuju integrasi dengan struktur masyarakat yang berada di luar desa. Namun, satu aspek positif yang perlu dicatat dalam hal ini, bahwa pergeseran nafkah menuju petani padi sawah tidak seluruhnya menghilangkan budaya Dayak dalam perladangan. Misalnya, masih terawatnya budaya pertukaran tenaga kerja dalam

mengerjakan usahatani padi sawah sebagaimana kebiasaan mereka dalam perladangan rotasi. Pertukaran tenaga kerja ini adalah kebiasaan bergotong-royong dalam pengerjaan usahatani, yang dalam bahasa Dayak Kanayan dinamakan “*alean*”. Pertukaran tenaga kerja dalam aktivitas usahatani ini, memiliki beberapa tujuan yaitu selain untuk menghemat pengeluaran dalam usahatani juga sebagai cara mengatasi langkanya tenaga kerja. Disamping itu, secara sosial juga berperan sebagai jembatan untuk mempererat hubungan sosial antar petani. Menurut Subejo (2009: 110) pertukaran tenaga kerja ini tergolong dalam pertukaran yang harus setara dalam jangka pendek (*strict and sort term reciprocity*), sehingga pertukaran seperti ini dapat disejajarkan sebagai arisan tenaga kerja.

Pada sisi lain, pekerjaan luar usahatani juga sudah mulai berkembang yaitu meliputi perdagangan karet dan barang-barang kebutuhan pokok yang diproduksi di perkotaan. Di desa ini setidaknya telah terdapat 3 pedagang pengumpul karet, 3 warung yang menjual kebutuhan pokok, dan 2 bengkel sepeda motor. Berdasarkan pada kenyataan sebagaimana dideskripsikan di atas, maka proses pergeseran nafkah di Desa Kayu Tanam dikategorikan telah berjalan dengan baik karena mampu menjamin ketersediaan pangan dan ketentraman warga yang menjadi penghuninya.

### **Pergeseran Nafkah Menjadi Pekebun Kelapa Sawit**

Untuk memahami fenomena pergeseran nafkah di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit, pada studi ini mengambil kasus di Desa Manggang, sebuah desa yang masih berada di wilayah administratif Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Penduduk Desa Manggang dengan luas wilayah 34 km<sup>2</sup>, berjumlah 1.180 jiwa dan 217 rumah tangga (BPS Kabupaten Landak, 2014: 11-13). Permukiman penduduk umumnya berada di tepi jalan desa yang menghubungkan desa ini dengan pusat kecamatan. Sepintas bisa diketahui, sudah tidak ada lagi rumah betang panjang yang menjadi ciri khas

suku Dayak, bahkan beberapa rumah di pinggir jalan desa sudah banyak yang menggunakan bahan bangunan moderen layaknya di perkotaan, seperti atap metal, lantai keramik, dan lain sebagainya.

Setelah hutan di sekitar desa habis, sumber nafkah utama di Desa Manggang adalah dari penjualan karet, sedangkan sumber pangan padi, sayuran, dan umbi-umbian masih mengandalkan pada hasil perladangan (lahan kering) meskipun kegiatannya sudah sangat terbatas. Sudah ada pertanian padi sawah pada lembah-lembah sekitar perbukitan, namun tidak seluas seperti di Desa Kayu Tanam, karena sumber daya tanah di desa ini sebagian besar berupa lahan kering. Pada sisi lainnya, memelihara ternak babi dan ayam masih tetap dilakukan sebagai upaya menambah pendapatan rumah tangga.

Pada tahun 2008, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Satria Multi Sukses masuk ke wilayah desa ini, sejak itu sumber nafkah masyarakat desa pun bertambah. Namun, tidak semua rumah tangga mendapatkan pembagian hasil kebun kelapa sawit, hanya mereka yang menyerahkan lahan saja yang mendapat pembagian hasil dengan pola bagi hasil 80% : 20%. Artinya, 80% bagian hasil adalah untuk perusahaan dan 20% untuk pemilik lahan. Akibat masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, berdampak kepada semakin menyempitnya ketersediaan lahan untuk perladangan dan pengembangan kebun karet rakyat. Sebab, untuk berdirinya satu perusahaan perkebunan kelapa sawit memerlukan lahan yang cukup luas, misalnya untuk PT Satria Multi Sukses saja memiliki ijin usaha perkebunan (IUP) seluas 29.000 hektar.

Pada awal pembukaan kebun, masuknya perkebunan kelapa sawit telah menyediakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Misalnya, rumah tangga yang bekerja sebagai buruh saja bisa memperoleh penghasilan 3–4 juta rupiah per bulan. Tetapi sayangnya, keadaan seperti itu tidak berlangsung lama, justru setelah kelapa sawit berbuah (periode tanaman menghasilkan)

pekerjaan di perkebunan malah semakin sedikit. Pada saat ini, setelah tanaman kelapa sawit berumur sekitar 7 tahun, setiap rumah tangga hanya memperoleh kesempatan kerja rata-rata 4–9 hari kerja per bulan dengan penghasilan Rp. 302.400 – Rp. 680.400. Sementara itu, penghasilan dari bagi hasil kebun kelapa sawit sangat jauh dari harapan, karena hingga saat ini hasilnya masih sangat kecil, misalnya banyak rumah tangga yang hanya memperoleh hasil kurang dari Rp. 500.000,- dalam setiap kali pembagian hasil.

Kecilnya hasil dari kebun ini, karena bagi hasil sebesar 20% bagi pemilik lahan ternyata bukan penghasilan bersih dihitung dari produksi kelapa sawit, namun masih harus dipotong oleh biaya investasi dan pengelolaan kebun yang sangat sulit dipahami oleh orang Dayak. Kondisi ini sangat mengecewakan dan meresahkan, sebagai akibatnya sering terjadi konflik yang tidak diharapkan. Pemblokiran jalan untuk mengganggu aktivitas perusahaan pun sering dilakukan, bahkan masalah ini juga sudah diadukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapupaten Landak, meskipun belum membuahkan hasil. Gambaran kasus di desa ini, sangat berbeda dengan temuan penelitian Budidarsono dkk. (2012: 3), bahwa perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan petani 2 sampai 3 kali lipat setelah 5 tahun terlibat dalam budidaya kelapa sawit.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit juga telah meningkatkan pendapatan yang nyata bagi mereka yang menjadi karyawan, misalnya satpam, mandor, pengurus koperasi atau mereka yang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada melalui kedekatan hubungan dengan orang perusahaan. Kenyataan ini, selanjutnya telah menggiring kepada terjadinya kesenjangan pendapatan diantara warga. Gejala terjadinya kesenjangan pendapatan seperti ini, selaras dengan temuan penelitian Mukti et al. (2014: 104) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Masalahnya sama, yaitu terkait dengan rendahnya serapan tenaga kerja,

terutama setelah kelapa sawit memasuki masa panen (periode Tanaman Menghasilkan). Oleh karena itu, Mukti menyarankan perlunya perusahaan perkebunan kelapa sawit menerapkan teknologi yang lebih *labor intensive* daripada *capital intensive*.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, maka nafkah di desa ini dapat dirinci ke dalam beberapa sumber, yaitu sebagai buruh atau peserta pada perusahaan perkebunan kelapa sawit, perladangan pada lahan kering, usahatani padi sawah, perkebunan karet rakyat, dan memelihara ternak babi atau ayam. Adanya warga yang terlibat dalam aktivitas perkebunan kelapa sawit, lebih lanjut telah menimbulkan perubahan sosial dan pergeseran corak kehidupan suku Dayak dari masa sebelumnya. Namun, gejala yang perlu diwaspadai dari semua perubahan itu adalah terindikasi meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi diantara warga di sekitar perkebunan. Kesenjangan sosial cenderung meningkat, ketika semakin menurunnya rasa solidaritas antar sesama warga dan meningkatnya orientasi ekonomi dari mereka yang sudah merasa nyaman dengan keadaan saat ini. Sementara itu, kesenjangan ekonomi juga semakin meningkat dilihat dari bahan bangunan rumah, kendaraan, dan perabot rumah tangga yang digunakan. Mereka yang kurang pandai berhubungan dengan perusahaan dan masih berkuat dengan orientasi tradisionalnya, tetap tertinggal dalam kondisi ekonomi dan kesejahteraan yang tidak banyak berubah. Kondisi ini sangat berbeda dengan kasus pergeseran nafkah pada ekosistem padi sawah yang cenderung menimbulkan pemerataan ekonomi, ketentraman, dan terpeliharanya solidaritas sosial.

## **SIMPULAN**

Melihat alur sejarahnya, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, suku Dayak di Kalimantan Barat merupakan suku pengembara hutan. Mereka telah merasakan kedamaian dan bebas mencari

sumber-sumber pangan alami di hutan yang sangat kaya, sampai akhirnya memasuki era kemerdekaan dan Orde Lama. Namun kemudian mulai terusik sejak intervensi Orde Baru untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu alam. Berdirinya perusahaan-perusahaan penebang pohon ketika rezim Orde Baru, telah menghabiskan hutan primer tempat suku Dayak berbudaya, dalam waktu yang relatif singkat.

Memasuki era Reformasi dan Otonomi Daerah, suku Dayak terus mendapatkan himpitan sebagai konsekuensi dari hutan yang telah terbuka. Kini penghidupan suku Dayak berada dalam tiga ekosistem yang mendampinginya, yaitu: (a) kawasan hutan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah setelah era kemerdekaan, (b) daerah pertanian padi sawah pada lokasi dataran rendah di sekitar perbukitan, dan (c) wilayah sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet. Masih berlangsungnya perladangan rotasi pada masyarakat yang berdiam di sekitar dan dalam kawasan hutan menimbulkan konflik pemanfaatan kawasan dengan pemerintah. Banyak kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah diklaim oleh orang Dayak sebagai lahan milik mereka yang dapat digunakan untuk perladangan. Oleh karena itu, sampai saat ini pemerintah masih menghadapi dilema dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi yang berada dalam masalah seperti itu, dan memiliki kekhawatiran terjadi degradasi jika pengelolaan kawasan diserahkan kepada masyarakat lokal. Konflik belum berakhir dan komunitas suku Dayak tetap berladang, akibatnya luas kawasan hutan konservasi pun terus menyusut dari waktu ke waktu.

Pada sisi lain, pergeseran nafkah terus berlangsung baik di kawasan ekosistem padi sawah, maupun kawasan sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pergeseran nafkah pada ekosistem padi sawah telah berjalan dengan baik, sebab transformasi yang terjadi tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan

ekonomi. Aspek yang masih harus ditingkatkan adalah produktivitas usahatani. Sebaliknya, pergeseran nafkah di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit, meskipun telah memberikan sumbangan dalam peningkatan pendapatan, namun mengarah pada menguatnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang perlu diwaspadai oleh berbagai pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadir W., Nurhaedah M., dan Purwanti R. 2013. Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10, No. 3, Hlm. 186-198.
- Alloy S., Albertus, Istiyani C.P. 2008. *Mozaik Dayak, Keberagaman Sub Suku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*. Cetakan Pertama. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Alqadrie S.I. 1994. "Dampak Perusahaan Pemegang HPH dan Perkebunan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya Penduduk Setempat di Daerah Pedalaman Kalimantan Barat." dalam Florus P., Juweng S., Bamba J., Andasputra N. (ed.) *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: PT Grasindo. Hlm. 244-260
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak. 2014. *Kecamatan Mandor dalam Angka*. Ngabang: BPS Kabupaten Landak.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 1991. *Kalimantan Barat dalam Angka*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 1995. *Kalimantan Barat dalam Angka*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 1999. *Kalimantan Barat dalam Angka*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2005. *Kalimantan Barat dalam Angka*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan

- Barat. 2010. *Kalimantan Barat dalam Angka*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2015. *Kalimantan Barat dalam Angka*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak. 2011. *Potret Hutan Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak: BPKH.
- Budidarsono S., Dewi S., Sofiyuddin M., and Rahmanulloh A. 2012. "Socioeconomic Impact Assessment of Palm Oil Production." *Technical Brief No. 27: Palm Oil Series*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre-(ICRAF), SEA Regional Office.
- Coomans M. 1987. *Manusia Daya Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. 2010. *Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009*. Pontianak: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. 2015. *Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014*. Pontianak: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
- Dharmawan A.H. 2007. "Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor." *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 1 (2), hlm.169-192.
- Dove M.R. 1988. *Sistem Perladangan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunggio I. dan Gunawan H. 2009. "Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6 (1), hlm. 43-56.
- FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor-Indonesia: Forest Watch Indonesia (FWI) dan Washington D.C.: Global Forest Watch (GFW).
- Hardin G. 1968. "The Tragedy of the Commons." *Science, New Series*, 62 (3859), hlm. 1243-1248.
- Hasanuddin. 2014. *Pontianak Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Hollenbach A.J. 2005. "Promise or Peril? The Fate of Indonesia's Protected Areas in an Era of Decentralization." *Journal of Development and Social Transformation*, 2, November, hlm. 79-87.
- Idrus M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Kalimantan Review*. 2013. "Laporan Khusus: Dampak Perubahan Iklim." No. 209/Th.XXI/November/2013.
- Langton M., Rhea Z.M., and Palmer L. 2005. "Community-Oriented Protected Areas for Indigenous Peoples and Local Communities." *Journal of Political Ecology*, 12, hlm. 23-50.
- Mukti A., Setiawan B., Pramudyo H., and Fatah L. 2014. "The Impact of Palm Oil Plantation Development towards Income Disparity." *Academic Research International*, 5 (2) hlm. 96 – 106.
- Nawiyanto. 2015. "Berjuang Menyelamatkan Lingkungan: Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kemerdekaan 1950-2000." *Paramita: Historical Studies Journal*, 25 (1), Hlm. 51-72.
- Nieuwenhuis A.W. 1994. *Di Pedalaman Borneo, Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Obie M., Soetarto E., Soemarti T., dan Saharuddin. 2015. "Sejarah Penguasaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini." *Paramita: Historical Studies Journal*, 25 (1), Hlm. 73-87.
- Soekanto S. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subejo. 2009. "Characteristics and Functions of Labor Institutions in Rural Java: A Case Study in Yogyakarta Province." *Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS)*, 15 (1), hlm.101 – 117.
- Verbist B. dan Pasya G. 2004. "Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik dan Negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat-Propinsi Lampung." *Agrivita*, 26 (1), Hlm. 20-28.